TAJUK RENCANA

Minyak Rakyat Juga Disunat

KORUPSI memang sedang merajalela di negara kita. Belum juga usai kemelut korupsi di Pertamina, kini Minyakita disunat. Industri yang sengaja dibuat untuk kebutuhan rakyat, dikurangi jumlah ukurannya.

Kementerian Perdagangan Indonesia kini melakukan penyelidikan terhadap beberapa produsen Minyakita yang terbukti mengurangi takaran minyak goreng tersebut. Temuan ini muncul setelah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melakukan inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan 8 Maret 2025. Dalam inspeksi tersebut, ditemukan bahwa kemasan Minyakita yang seharusnya berisi 1 liter hanya memiliki volume antara 750 hingga 800 mililiter.

Sedikitnya, 3 perusahaan diduga telah memangkas takaran minyak goreng mereka, yang merugikan konsumen, terutama saat bulan Ramadan dimana permintaan bahan pokok meningkat. Selain itu, harga jual Minyakita juga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Polisi ungkap 3 modus operandinya.

Menteri Amran menegaskan, tindakan ini merupakan pelanggaran serius dan meminta agar perusahaan-perusahaan tersebut diproses secara hukum. Ia juga menyarankan agar izin usaha mereka dicabut jika terbukti bersalah.

Pengurangan takaran Minyakita berdampak signifikan terhadap masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Yang pasti rakyat dirugikan secara finansial. Masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng mereka. Dengan takaran yang sebenarnya hanya 750-800 ml, konsumen mengalami kerugian sekitar Rp3.925 hingga Rp4.300 per liter, tergantung pada harga pasar. Hal ini mengurangi daya beli mereka untuk kebutuhan lain seperti makanan, pendidikan, dan transportasi.

Ketidaksesuaian volume memaksa konsumen untuk membeli lebih banyak minyak dari yang diperlukan. Ini berarti pengeluaran mereka meningkat tanpa mendapatkan nilai yang sesuai, sehingga mengganggu anggaran keluarga.

Praktik kecurangan ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan produsen dalam mengelola kebutuhan pokok. Ketidakpuasan ini bisa berujung pada protes atau ketidakstabilan sosial, terutama saat permintaan bahan pokok meningkat menjelang hari raya Idul Fitri.

Dalam skala nasional, ketidaksesuaian volume ini memberikan keuntungan besar bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Diperkirakan, keuntungan dari selisih volume mencapai Rp667,25 miliar hingga Rp731 miliar setiap bulan, yang seharusnya tidak terjadi jika produk sesuai dengan standar.

Secara keseluruhan, pengurangan takaran Minyakita tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat berkontribusi pada masalah ekonomi yang lebih luas di masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran semacam ini untuk melindungi konsumen.

Dari realitas demikian, masyarakat juga mendapat pelajaran berharga, untuk bisa luput dari praktek penipuan. Diharapkan masyarakat dapat melindungi diri dari praktik curang seperti pengurangan takaran Minyakita melalui beberapa langkah strategis.

Masyarakat perlu memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, termasuk mengenali takaran yang seharusnya ada pada produk. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi dan penyuluhan mengenai standar produk. Selalu periksa kemasan dan label produk sebelum membeli. Pastikan bahwa volume atau berat yang tertera sesuai dengan yang seharusnya. Jika menemukan ketidaksesuaian, catat dan laporkan kepada pihak berwenang.

Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai praktik curang dan mengajak orang lain untuk lebih waspada.

Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi diri dari praktik curang dan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk berkualitas sesuai dengan hak mereka sebagai konsumen. **(***)-d**

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Banjir Berulang, Cermin Buruk Tata Kelola

M Taufiq AR

BANJIR Jakarta 2025, atau Banjir Jabodetabek 2025, adalah bencana banjir besar yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang sejak 3 Maret 2025 malam. Banjir tersebut dipicu curah hujan deras dan meluapnya sungai yang kebanyakan berhulu di Bogor, khususnya daerah Jonggol, Bogor dan Puncak. Setidaknya 7 orang dilaporkan tewas, bencana ini merupakan banjir terburuk yang pernah melanda Jakarta dan sekitarnya sejak banjir 2020.

Banjir besar pernah melanda Jakarta, pada tahun 1621, 1654, 1918, 1942, 1976, 1996, 2002, 2007, 2013, 2015, 2018, dan 2020. Meskipun banjir besar serupa pernah terjadi di wilayah Jakarta di masa lalu, banjir yang berulang terjadi belakangan lebih parah, menjadi cermin buruknya tata kelola kebijakan tata ruang.

Berhenti Mengkambing-hitamkan Alam

Kita selayaknya tidak menyalahkan curah hujan atau faktor alam sebagai penyebab bencana. Banjir dan tanah longsor yang terus berulang adalah dampak dari buruknya tata kelola lingkungan, lemahnya penegakan kebijakan tata ruang, serta minimnya investasi dalam pencegahan dan mitigasi bencana.

Bencana ini bukan sekadar fenomena alam, bencana terjadi akibat konsekuensi dari interaksi antara fenomena alam, kerentanan, dan kapasitas, di mana keputusan manusia memainkan peran penting. Ketika daerah resapan air dihilangkan untuk proyek komersial, ketika daerah aliran sungai dan drainase tidak diperbaiki, ketika peringatan dini tidak ditindaklanjuti dengan baik, maka dampaknya adalah kerugian besar yang dialami masyarakat.

Banjir yang melanda Jabodetabek pada awal Maret 2025 berdampak pada hampir 120 ribu warga terdampak akibat curah hujan ekstrem yang diperparah oleh buruknya sistem drainase, penyempitan daerah aliran sungai, dan berkurangnya daerah resapan air. Sementara pemerintah daerah harus mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk respons dan pemulihan bencana. Selain itu, risiko ancaman penyakit akibat banjir dan kerusakan ekonomi daerah meningkat akibat infrastruktur yang rusak.

Semua ini sebenarnya adalah pilihan. Bencana bisa dicegah, asalkan kepala daerah mengambil keputusan yang

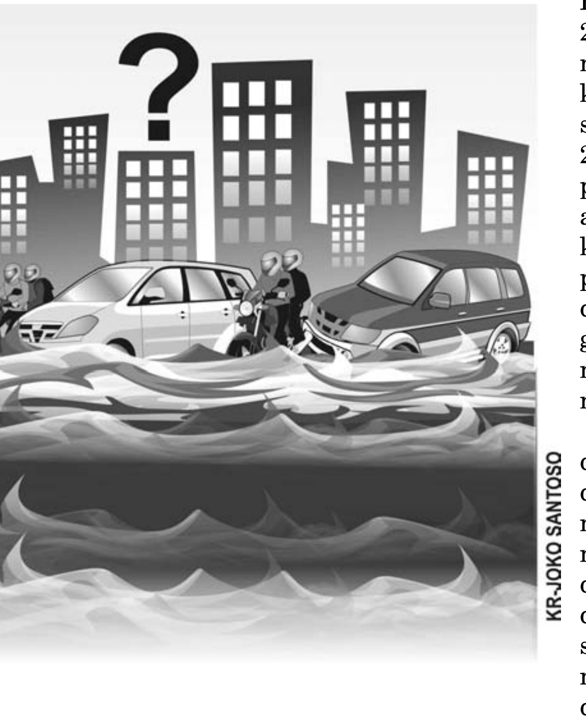

tepat untuk memastikan keselamatan warganya. Pemerintah daerah harus berhenti mencari kambing hitam pada alam, dan mulai memperbaiki kebijakan serta investasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan. Banjir bukan semata karena hujan deras, tetapi akibat buruknya tata kelola lahan dan pemanfaatan ruang. Longsor bukan semata karena curah hujan tinggi, tetapi juga karena eksploitasi lahan dan deforestasi di daerah hulu.

Langkah Solusi Strategis ke Depan

Para Kepala daerah yang baru dilantik tidak boleh hanya fokus pada respons darurat bencana, namun harus berpikir jangka panjang. Saat ini, mereka memiliki kesempatan emas dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah berorientasi pada keselamatan warga dan kelestarian lingkungan. Jika kebijakan saat ini tidak dikoreksi, niscaya kita akan menghadapi dampak yang lebih buruk di masa depan.

Penyusunan RPJMD 2025-2029 saat ini baru pada tahap penyusunan rancangan awal, dengan target disahkan pada bulan Agustus 2025. RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cetak biru pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Pemerintah daerah harus mengintegrasikan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan mereka, pada RPJMD 2025-2029.

Solusi strategis berbasis kebijakan Pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 harus dirumuskan dengan serius. Pertama, menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas dalam RPJMD 2025-2029 dengan fokus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Kedua, menjadikan kebijakan tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai rujukan konsisten dalam pemanfaatan ruang dan pembangunan.

Ketiga, meningkatkan kehandalan dan efektivitas peringatan dini, dengan memastikan informasi cuaca ekstrem dapat diterima masyarakat dan pemerintah daerah dalam format yang mudah dipahami, tepat waktu, dan dapat segera ditindaklanjuti. Keempat, menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang berisiko menciptakan bencana baru, termasuk revisi proyek pembangunan yang berpotensi memperburuk dampak bencana. (*)-d

)M Taufiq AR**, Koordinator Umum Forum PRB DIY, Pengurus Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

SURAT TERBUKA UNTUK MENTERI KEBUDAYAAN

Mau Dibawa ke Mana Kebudayaan Kita?

Satmoko Budi Santoso

DALAM wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap, ternyata orang Eropa bisa lebih paham tentang Indonesia dibanding orang Indonesia sendiri. Khususnya mengenai potensi budaya atau harta karun apa pun yang ada di bumi Indonesia.

Salah satu buktinya, menurut Fadli Zon, temuan keberadaan buku berbahasa Belanda mengenai Priangan yang tebal dan berjilid-jilid. Buku tebal-tebal itu tentu saja juga menunjukkan keseriusan para saintis Eropa dalam mendokumentasikan pengetahuan mengenai kekayaan alam atau apa pun di bumi Indonesia. Rupanya, ide besar dari isi buku itu membuat Fadli Zon terpantik ingin menemukan kembali budaya Indonesia yang masih tersembunyi dan berusaha mengembalikan lagi kebudayaan Indonesia sebagai bagian penting poros budaya dunia.

Tentu saja gagasan ingin mengelaborasi dan menemukan serta memetakan kembali budaya Indonesia yang masih tersembunyi itu patut ditunggu. Itulah salah satunya arah orientasi pengembangan kebudayaan yang akan dibawa dan memang sedang gencar disosialisasikan.

Namun, cita-cita menggali lagi kebudayaan Indonesia yang masih terpendam ini tentu saja juga perlu hati-hati, semoga tidak terjebak pada kemungkinan bertemu adanya mafia artefak fiktif yang mengaburkan orisinalitas sumber kebudayaan yang tersembunyi itu.

Memang belum ada penelitian yang valid mengenai kemungkinan mafia artefak fiktif ini, namun ada baiknya jika memang diwaspadai. Apa yang disebut mafia artefak fiktif adalah jaringan mafia pembuatan artefak yang seolah-olah menjadi bernilai masa lalu padahal dibuat di masa kini.

Bahan pembuatannya saja yang memang bernilai masa lalu. Misalnya, kayu ulin. Kayu ini bisa berusia ratusan tahun, namun apa daya jika kemudian dikreasi menjadi bentuk karya seni tertentu di masa kini. Pastilah seperti dibuat di masa lalu jika dilihat secara sepintas.

Ingat, Majalah Tempo edisi Juni-Juli 2012 pernah meletupkan geger kebudayaan ketika mampu melakukan investigasi cukup bagus terhadap jaringan lukisan palsu di Indonesia. Nah, apakah hal tersebut akan berulang pada kemungkinan adanya investigasi jaringan mafia artefak fiktif?

AI yang Problematis

Hal lain yang menurut saya cukup problematis dalam menemukan kembali identitas keindonesiaan kita melalui kebudayaan adalah perihal penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) yang bisa mengakibatkan bias orisinalitas.

Cukup mengejutkan, akhir tahun lalu misalnya, balai lelang Sothebyís di Amerika mampu menjual karya robot AI berupa lukisan berjudul *AI God* senilai Rp 20,7 miliar.

Apakah ini kabar menggembirakan atau bukan, sebuah pencapaian tersendiri dalam karya seni atau bukan, pastilah bernilai relatif. Namun, bagi saya, hal ini justru membuka imbas kurang baik dalam perjalanan membangun kultur orisinalitas karya seni itu sendiri.

Bayangkan, jika kelak karya AI lebih mendominasi dan justru laku dijual dengan harga tinggi, lalu bagaimana dengan para perupa yang telah mempelajari seni mulai dari mata kuliah dasar membuat sketsa hingga nirmana, belajar *skill* alami secara intensif, tiba-tiba berhadapan dengan situasi pasar yang mematikan kreasi alami itu sendiri?

Tentu saja akan menjadi mengerikan jika kelak orang-orang yang belajar metodologi seni dengan baik dan benar selama sekian semester justru menjadi penonton setia karya seni AI yang dibuat instan. Petaka estetika akan terjadi dalam situasi ini.

Artinya, bukankah sebenarnya kita memerlukan regulasi khusus mengenai estetika karya AI ini dan perlu diantisipasi dari sekarang? Apakah sekiranya juga perlu melakukan pembatasan terhadap karya-karya AI sehingga karya seniman sebagai manusia asli tetap mendapatkan tempat dalam selera publik?

Menginventarisir kemungkinan problem perkembangan kebudayaan kita di masa depan tentu saja juga perlu menjadi bidikan mulai sekarang, salah satunya bisa saja dengan mempertegas regulasi dalam pengembangan estetika karya seni apa pun.

Pastilah akan aneh jika kelak di masa depan para seniman sebagai manusia asli justru hanya bengong menikmati karya instan AI di gedung-gedung pameran yang mewah, menjadi robot paling bodoh yang hanya bisa menonton sembari tertawa. *****-d**

)Satmoko Budi Santoso,** penerima Anugerah Kebudayaan DIY 2024 Bidang Sastra.*

Pojok KR

Lagi, 3 pemain naturalisasi diambil sumpahnya.

- Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi Timnas kita.

***

Diprediksi mudik Idul Fitri 146 juta orang lebih.

- Yogya harus siap rekayasa lalu lintas agar tak macet.

***

Polisi ungkap 3 modus Penyunatan isi Minyakita.

- Apapun alasannya, harus ditindak tegas.

Berabe